

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang individu atau kelompok dalam suatu masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang diakibatkan oleh tingkat pendapatan yang rendah. Pada dasarnya pemerintah berkewajiban mensejahterakan rakyatnya secara adil dan makmur. Ukuran sejahtera biasanya dapat dilihat dari kemampuan setiap orang dalam memenuhi kebutuhannya berbeda-beda. Pada sebagian kelompok tertentu terdapat masyarakat atau lembaga-lembaga yang membutuhkan pembiayaan modal dalam mengupayakan kelangsungan hidup diri sendiri dan orang banyak, maka dari itu Pemerintah menyelenggarakan pembangunan mahadagamasanagaga gatanale Guna Meningkatkan kemakmuran rakyatnya, yaitu mewujudkan kembali masyarakat yang maju, sejahtera adil dan makmur berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 (Rezky Muhammad, 2010).

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (a) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (b) hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (c) hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (d) hak rakyat untuk akses atas kebutuhan hidup ( sandang, pangan, papan); (e) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan ; (f) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (g) hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (h) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan public dan

pemerintah; (i) hak rakyat berinovasi; (j) hak rakyat untuk menjalankan hubungan spirituanya dengan tuhan dan (k) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintah dengan baik ( Bappenas, 2018).

Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup ( World Bank, 2005). Menurut Bank Dunia salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinir dan terintegrasi.

Kemiskinan sering dikaitkan dengan keterbatasan penduduk dalam memperoleh pelayanan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator keterbatasan tersebut sering ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan penduduk yang terdiri dari tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal, dan kondisi kesehatan. Indikator-indikator juga sering digunakan sebagai indikator kemiskinan. Tingkat kesejahteraan penduduk yang juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terbentuk dalam komunitas akan memberikan karakteristik kemiskinan yang berbeda antara wilayah satu dengan lainnya (Baharoglu dan Kessides, 2001). Komitmen serta konsistensi pemerintah dalam meningkatkan

perkembangan ekonomi( economic growth) dengan cara- cara yang adil tanpa mengecualikan masyarakat miskin harusnya dapat meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari oleh hak- hak asasi manusia, nondiskriminasi, serta memberikan proteksi kepada masyarakat miskin, karena hal tersebut merupakan suatu hakikat paradigma pembangunan sosial.

Negara di dunia terlebih negara berkembang hingga saat ini masih saja mempunyai identitas paling utama terkait kemiskinan, karena hal ini masih sulitnya mengelola pasar dalam negaranya selaku pasar persaingan yang lebih sempurna. Pada saat tidak bisa mengelola pembangunan ekonomi, sehingga kecenderungan kekurangan kapital bisa terjalin, diiringi dengan rendahnya produktivitas, turunnya pemasukan riil, rendahnya tabungan, serta investasi alami penyusutan sehingga melingkar ulang mengarah kondisi minimnya modal. Oleh karna itu, tiap usaha memerangi kemiskinan sepatutnya ditunjukkan untuk memotong lingkaran kemiskinan .

Permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia termasuk bagi pemerintah Provinsi Jambi.Untuk di Provinsi Jambi sendiri kondisi kemiskinan temntunya berbeda-beda pada setiap wilayah karena kondisi dan factor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan msing-masing wilayah juga berbeda. Dapat dilihat bagaimna tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di provinsi Jambi pada table 1.1 berikut ini :

**Table 1.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2001-2019 (%)**

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)						Rata-rata
	2002-2004	2005-2007	2008-2010	2011-2013	2014-2016	2017-2019	
Provinsi jambi	326.43	301.43	255.57	263.53	290.76	280.85	286.43
Kerinci	35.43	36.90	21.63	17.72	18.06	17.14	24.48
Merangin	41.10	38.13	26.77	29.91	35.52	34.10	34.26
Sarolangun	39.67	36.87	23.60	25.88	27.57	25.57	29.86
Batanghari	38.80	36.03	23.53	25.84	27.86	27.19	29.88
Muaro jambi	26.23	24.47	15.43	18.37	17.75	17.51	19.96
Tanjung jabung timur	22.87	28.33	26.87	26.97	28.80	26.52	26.73
Tanjung jabung barat	38.50	31.00	31.73	33.09	37.34	35.91	34.60
Tebo	27.87	24.20	17.10	20.62	23.03	22.96	22.63
Bungo	30.13	21.87	15.20	17.75	19.27	20.93	20.86
Kota jambi	25.93	23.67	52.73	53.00	52.69	50.55	43.09
Kota sungai penuh			3.00	3.01	2.87	2.50	2.84
Rata-rata							47.97

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, 2020*

Berdasarkan tabel 1.1, tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2002 hingga 2019, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota masih cenderung mengalami fluktuasi atau masih adanya kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relative dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi. Rata-rata jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu terjadi di Kota Jambi dengan sebesar 43,09 persen, sementara rata-rata jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada Kota Sungai Penuh dengan angka sebesar 2,84 persen.

Tingginya tingkat kemiskinan di Kota Jambi tidak terlepas dari strategi pembangunan yang diterapkan. Strategi pembangunan dilaksanakan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan sosial dan politik, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa efek menetes kebawah yang diharapkan tidak berjalan sempurna, pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum diikuti penurunan jumlah kemiskinan sehingga tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Dukungan percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sangat diperlukan, karena sebagai perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan, untuk itu pemerintah merealisasikan belanja bantuan sosial diluar campur tangan pihak swasta. Meskipun kategori belanja pemerintah lainnya juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan sosial pada dasarnya dianggap sebagai yang terpenting khususnya untuk meningkatkan potensi penghasilan masyarakat miskin termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan bantuan sosial sebagai strategi dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Belanja Hibah juga memegang peran penting dalam kegiatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian

sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah adalah bagian dari belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kehadiran hibah dapat dijadikan sebagai bantuan modal usaha kepada kelompok masyarakat dan perorangan untuk membangkitkan ekonomi. Hal ini akan terlihat jelas dari aktivitas usaha masyarakat seperti pemanfaatan lahan tidur, penggunaan teknologi baru dalam mengelola usaha dan semakin baiknya aset yang dimiliki seperti rumah kendaraan dan lain sebagainya.

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Dalam pelaksanaannya proses pemberian hibah dan bantuan sosial yang dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi melibatkan Perangkat Daerah Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian Daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara

ideal seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat

Untuk mengetahui data belanja hibah ,belanja bantuan, pertumbuhan penduduk serta tingkat kemiskinan di Kota Jambi dapat dilihat pada table 2.2 berikut ini :

**Table 1 .2 Realisasi Anggaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kota Jambi selama periode tahun 2001-2019**

Tahun	Belanja Hibah (Rp)	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Pertumbuhan ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2001	1,888,260,000	472,290,000	0	0
2002	9,183,970,000	409,580,000	3.68	5.32
2003	10,018,950,000	1,476,330,000	4.85	6.26
2004	10,444,140,000	3,552,530,000	5.16	6.04
2005	7,391,321,000	352,377,000	5.69	5.37
2006	12,469,860,000	2,633,770,000	5.93	5.18
2007	253,513,000	3,007,657,250	6.14	5.04
2008	13,592,162,880	3,831,823,554	6.14	11.63
2009	21,762,990,996	2,978,715,443	6.47	10.54
2010	10,663,181,703	4,458,174,829	6.66	9.90
2011	15,201,930,654	4,680,747,829	6.97	9.27
2012	8,202,223,300	4,680,747,810	7.67	9.80
2013	41,322,686,558	2,436,830,000	8.5	9.96
2014	3,791,283,500	4,282,750,000	8.17	8.94
2015	5,627,038,649	3,645,000,000	5.56	9.67
2016	26,133,087,504	1,557,150,000	6.81	8.87
2017	27,987,501,839	3,407,880,000	4.68	8.84
2018	44,698,302,282	3,915,540,000	5.48	8.49
2019	53,641,691,988	5,801,400,000	5.33	8.12

Sumber : BPKAD Kota Jambi, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 , untuk data belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada tahun 2001-2019 merupakan data yang diperoleh pada dokumen laporan realisasi Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Daerah (APBD) bersumber dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi. Untuk data pertumbuhan ekonomi diperoleh pada laju pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Kabupaten Kota bersumber pada publikasi Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi jambi. Dan data tingkat kemiskinan diperoleh pada persentase penduduk miskin bersumber pada publikasi Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jambi.

Uraian pada tabel 1.2 tersebut adalah, diketahui anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial di Kota Jambi alami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, hal ini juga menjadikan pertumbuhan ekonomi juga alami peningkatan penurunan. Seharusnya dengan jumlah anggran yang disiapkan oleh pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan, namun yang terjadi pertumbuhan ekonomi masih berfluktuasi dan kemiskinan belum dapat dikurangi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut dalam penelitian tesis dengan judul **“Pengaruh belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi periode tahun 2001-2019.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena diatas, belanja hibah dan belanja bantuan sosial selama periode tahun 2001-2019 tahun alami peningkatan dan penurunan anggaran, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tidak pernah stabil. Untuk mengetahui lebih lanjut maka rumusan masalah yang akan diteliti diajukan dalam pertanyaan berikut:

1. Bagaimana perkembangan belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi selama tahun 2001-2019.
2. Bagaimana pengaruh belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi selama tahun 2001-2019.
3. Bagaimana pengaruh belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi selama tahun 2001-2019.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perkembangan belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi selama tahun 2001-2019.

2. Untuk menganalisis pengaruh belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi selama tahun 2001-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kota jambi selama tahun 2001-2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka, manfaat dari penulisan proposal tesis ini adalah :

1. Dari sisi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan mengenai belanja hibah, belanja bantuan sosial, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi kepada peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Dari sisi Praktisi , hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan rkonomi yang berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan.